

Implementasi Bantuan Program Peningkatan Kebiasaan Menuju Masyarakat Sejahtera Di Kelambir Lima

Fitra Arlina Nasution^{1*}

¹Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, North Sumatera Indonesia

¹Fitraarlina8@gmail.com

Received: (14 Juni 2024), Revised: (14 Juli 2024), Accepted: (24 Juli 2024)

ABSTRAK

Latar belakang dari pengabdian masyarakat ini adalah peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH), dengan tujuan agar masyarakat dapat mencapai kesejahteraan dan hidup yang layak. Sebagai salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara, Kelambir Lima menjadi lokasi pengabdian ini. Fokus pengabdian ini adalah untuk mengetahui apakah perubahan kebiasaan pelayanan memiliki pengaruh terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dampak dari PKH terhadap kesejahteraan masyarakat. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 227 KPM, dengan data yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dan dianalisis menggunakan SEM (Structural Equation Modeling) dengan software Amos. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel pelayanan sosial, bantuan sosial, dan permukiman memiliki pengaruh signifikan terhadap PKH. Selain itu, variabel permukiman juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan variabel pelayanan sosial dan bantuan sosial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, kesejahteraan masyarakat tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PKH.

Kata kunci: Program perubahan kebiasaan, pelayanan sosial, dan permukiman.

ABSTRACT

This community service initiative is driven by the goal of improving the well-being of beneficiary families (KPM) from the Family Hope Program (PKH) so that the community can achieve better living standards and welfare. As one of the cities in North Sumatra Province, Kelambir Lima was chosen as the location for this service. The focus of this initiative is to determine whether changes in service practices have an impact on the Family Hope Program (PKH) and community welfare. The aim of this research is to assess the influence of PKH on community welfare. The study involved a sample of 227 KPM, with data collected through questionnaires and analyzed using SEM (Structural Equation Modeling) with Amos software. The hypothesis testing results indicated that the variables of social services, social assistance, and housing have a significant impact on PKH. Additionally, the housing variable has a significant impact on community welfare, while the social services and social assistance variables do not significantly affect community welfare. Furthermore, community welfare does not have a significant impact on the PKH program.

Keywords: Behavior change program, community welfare, social services, and housing.

1. PENDAHULUAN.

Persoalan kemiskinan yang terjadi dalam suatu daerah selalu menjadi masalah yang serius karena dampak yang ditimbulkan begitu besar. Maraknya kegiatan dan perencanaan pembangunan belum sepenuhnya mampu mensejahterakan masyarakat bahkan semakin menambah angka kemiskinan disetiap daerah. Upaya pemerintah telah banyak melakukan berbagai kebijakan program ditambah melibatkan para pakar akademisi baik nasional maupun internasional untuk menuntaskan masalah kemiskinan yang tidak kunjung bisa diredam. Salah satu aspek penting dalam mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran (Restuhadi, et al., 2021). Tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan menekan laju pertumbuhannya menjadi salah satu tujuan pembangunan ekonomi suatu daerah.

Persentasi jumlah penduduk miskin tertinggi yaitu kelembir lima 9,98 Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 pasal 1 Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi (Indonesia, 2020). Adapun perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Tebing Tinggi sebagai berikut :

Tabel 1. Penduduk Miskin Di kelambir lima Pada Tahun 2010- 2024

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Persentase (%)
2010	1437	18,68
2011	1339	19,96
2012	2307	11,58
2013	2053	13,02
2014	1890	14,14
2015	1827	14,63
2016	1802	14,83
2017	1798	14,87
2018	1720	15,54
2019	1880	14,22
2020	1852	14,43
2021	1906	14,02
2022	1664	16,06
2023	1630	16,40
2024	1632	16,38
Total	26737	

Pada tahun 2010 berjumlah 1437 jiwa, namun pada tahun 2012 berjumlah 2307 jiwa yang berselisih jauh dari tahun 2010 hingga tahun 2013 berjumlah 2053 jiwa hingga pada tahun 2024 jumlah 1632 jiwa jumlah penduduk miskin di kelambir lima. Kemiskinan dipandang sebagai keadaan seseorang atau sekumpulan orang laki-laki dan perempuan yang tidak dipenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan membangunkan kehidupan yang bermartabat. Dengan demikian, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak asas dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekumpulan orang, dalam menjalani kehidupan dengan baik. Hidup miskin bukan hanya dalam keadaan kekurangan pakaian, makanan, dan perumahan. Akan tetapi, kemiskinan juga akses yang rendah pada sumber-sumber dan aset produktif untuk memperoleh keperluan-keperluan hidup, antara lain ilmu pengetahuan, maklumat, teknologi, dan modal. (Swiss Tantoro, 2014).

Tabel 2. Fokus Pemerataan Dan Kesejahteraan Ekonomi Kota kelambir lima

No	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertumbuhan PDRB (%)	49,50	5,11	5,14	5,17	5,15	5,08
2	PDRB Per kapita (Rp. Juta)	27,34	29,74	31,88	33,91	36,03	36,42
3	Pengeluaran Per kapita (Rp. Ribu)	11.393	11.747	12.055	12.434	12.895	-
4	Indeks Pembangunan Manusia	72,81	73,23	73,90	74,50	75,8	75,17
5	Indeks Gini	0,40	0,36	0,30	0,34	0,32	0,33
6	Angka Kemiskinan(%)	12,03	11,7	11,9	10,27	9,94	9,85
7	Angka Pengangguran (jiwa)	-	-	7.122	5.815	6.318	8.719

Dalam rangka upaya pemerintah deli Serdang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai langkah serta upaya yang telah dilakukan dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial merupakan implementasi program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Penyaluran bantuan sosial secara non tunai dilaksanakan terhadap bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan Pemberi Bantuan Sosial. Bantuan Sosial Pangan membantu 12 – 29% (dua belas sampai dua puluh sembilan persen) total pengeluaran makanan rumah tangga per bulan atau 10-14 hari kebutuhan pangan. Sebesar 96% (sembilan puluh enam persen) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) puas atas program BPNT/BSP secara umum dan kualitas bahan pangan yang didapatkan serta 86% (delapan puluh enam persen) KPM puas atas kuantitas bahan pangan yang didapat. BPNT/BSP juga memberikan peluang usaha bagi pengusaha mikro, terutama perempuan sekitar 68% (enam puluh delapan persen) serta mendorong gerakan nontunai dan mendukung inklusi keuangan. (Indonesia, 2020). Berikut adalah data anggaran dana serta cakupan keluarga penerima manfaat dari tahun 2007 hingga tahun 2018.

2. LANDASAN TEORI

2.1. Program Perubahan Kebiasaan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) istilah program mendefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta dengan usaha-usaha dalam ketatanegaraan. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis. Secara khusus, tujuan PKH adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan peserta PKH, meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH, dan untuk meningkatkan status kesehatan dan gizi peserta PKH. Seiring keberhasilan yang telah dicapai dan menurut pengamat. (RI, 2021)

Berdasarkan Pasal 3, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH dikatakan bahwa, sasaran PKH merupakan keluarga atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanggulangan fakir miskin, yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin yang memenuhi syarat untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga atau yang dikenal dengan *family development session* (FDS) merupakan sebuah intervensi perubahan perilaku yang terstruktur yang diberikan pada semua KPM PKH sejak tahun pertama kepesertaan PKH. Materi dimana disampaikan melalui pertemuan kelompok setiap bulan yang disampaikan oleh Pendamping Sosial PKH terhadap kelompok-kelompok dampingannya. Kegiatan P2K2 memiliki pola pembelajaran yang terstruktur dan sistematis hal ini dapat dilihat dari terdapatnya beberapa bentuk pembelajaran yang diberikan kepada KPM PKH, melalui modul-modul tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan KPM yang disampaikan oleh pendamping dapat meningkatkan kualitas pengetahuan dan keahlian para penerima manfaat. Modul-modul tersebut dibagi kedalam beberapa sesi pertemuan dengan alokasi dan kurikulum yang sudah ditentukan. Sehingga memudahkan bagi pesertanya dalam mengikuti proses pembelajaran yang diberikan. (Wijaya, 2019). Pertemuan peningkatan keluarga merupakan proses belajar secara struktur untuk mempercepat terjadi perubahan perilaku pada keluarga penerima manfaat PKH. Pertemuan kelompok secara rutin ini dilaksanakan guna membangun kesadaran para peserta keluarga penerima manfaat program keluarga harapan agar mereka dapat memahami pentingnya memenuhi kewajibannya dalam bidang kesehatan, ekonomi dan perlindungan anak selain itu kegiatan tersebut juga berfungsi untuk menggali potensi yang ada pada diri peserta dan lingkungannya agar dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

2.2. Pemutakhiran dan validasi data

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pemutakhiran adalah proses, cara, perbuatan memutakhirkan. Pemutakhiran berasal dari kata dasar mutakhir. Sedangkan arti kata validasi adalah pengesahan. Arti lainnya dari validasi adalah pengujian kebenaran atas sesuatu. Pemutakhiran data penerima manfaat PKH dilaksanakan setiap ada perubahan sebagian atau seluruh data anggota keluarga penerima manfaat yang bertransisi atau graduasi. validasi data calon penerima manfaat merupakan kegiatan pencocokan data calon penerima manfaat PKH dengan bukti fakta kondisi terkini sesuai dengan kriteria komponen yang dapat diperoleh dari pengumpulan informasi dari calon penerima manfaat PKH atau sumber lain yang dapat dipercaya dengan dukungan dokumen yang sah. pelaksanaan validasi ditemukan data yang tidak ada pada data awal calon penerima manfaat PKH maka data tersebut tidak dapat menjadi calon penerima manfaat pkh.

Berbagai program dicanangkan oleh TP2NK sebagai upaya peningkatan tingkat keuangan salah satunya adalah program Layanan Keuangan Digital (LKD) melalui Agen LKD sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 mengenai penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD) dalam rangka keuangan inklusif melalui Agen LKD. Konsep Layanan Keuangan Digital yang dimaksud berdasarkan Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 merupakan kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang bekerjasama dengan pihak ketiga atau yang disebut dengan Agen LKD dengan memanfaatkan teknologi berbasis mobile based maupun web based. Salah satu layanan yang diberikan Agen LKD adalah penyaluran dana Pemerintah kepada masyarakat. (Anggraeni, et al., 2017)

2.3. Kesejahteraan Masyarakat

Menurut (Fachrudin, et al., 2014) menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial diartikan suatu keadaan seseorang dapat mampu memenuhi seluruh kebutuhan serta mampu melakukan hubungan baik dengan lingkungan sekitar. (Fachrudin, et al., 2014). Kesejahteraan sosial dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu pendapatan yang cukup, pendidikan dan kesehatan yang terpenuhi. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran W.J.S Poewodarminto bahwa kesejahteraan merupakan kondisi dimana seseorang dalam keadaan aman, makmur sentosa, selamat dari berbagai segala macam gangguan masalah atau kesukaran dan sebagainya. (Fachrudin, et al., 2014) Gangguan masalah ini meliputi dari berbagai aspek yaitu gangguan kesehatan, gangguan pendidikan, gangguan kerja dan sebagainya.

Kesejahteraan menjadi titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat, Pandangan masyarakat umum, dalam keluarga yang sejahtera maka mampu menyekolahkan anggota keluarganya hingga setinggi mungkin (Mulia, et al., 2020). Sama halnya jika semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan membawa keluarganya semakin sejahtera karena mendapatkan timbal balik seperti pekerjaan yang mapan dan pendapatan yang mencukupi. Kesejahteraan merupakan tujuan dari seluruh keluarga. Kesejahteraan diartikan sebagai kemampuan keluarga untuk memenuhi semua kebutuhan untuk bisa hidup layak, sehat, dan produktif.

Menurut BPS tahun 2015 mempublikasikan indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat rakyat yang terdiri dari berbagai aspek yaitu pendidikan, kesehatan dan gizi, kependudukan, ketenagakerjaan, taraf dan konsumsi serta aspek sosial lain. (Faried, et al., 2018). Peningkatan Kesejahteraan menjadi suatu hal yang bersifat subjektif, sehingga setiap keluarga atau individu di dalamnya yang memiliki pedoman, tujuan, dan cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan.

2.4. Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial adalah pelayanan yang ditujukan kepada golongan masyarakat yang membutuhkan pertolongan dan perlindungan khusus. Pelayanan sosial diadakan untuk melindungi, mengadakan perubahan, atau menyempurnakan kegiatan-kegiatan pendidikan, asuhan anak, penanaman nilai, dan pengembangan hubungan sosial yang di masa lampau menjadi fungsi keluarga, lingkungan tetangga, dan kerabat. Menurut Sampara Lukman yang dikutip oleh (Sinambela, et al., 2014)), pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai hal, cara, atau hasil pekerjaan melayani.

Dalam pengertian lain, menurut Moenir (2015: 27) pelayanan hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu merupakan proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh organisasi dalam masyarakat. Perkembangan pelayanan sosial yang sangat cepat, motivasi yang beraneka ragam, diantara para penyusunnya dan besarnya beban kasus maupun tenaga yang terlibat di dalamnya menyebabkan perlunya menggunakan pelayanan. (Dr. Darmin Tuwu, 2021).

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 15 tahun 2014 menyatakan dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip :

- a. Sederhana

Standar pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.

b. Partisipatif.

Penyusunan standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.

c. Akuntabel.

Hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan.

d. Berkelanjutan.

Standar pelayanan harus terus-menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan.

e. Transparansi.

Standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.

f. Keadilan.

Standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

3. METODE PELAKSANAAN.

Pengabdian ini menggunakan metode kausal penelitian yang bersifat menyatakan antara dua variabel atau lebih yang bersifat sebab akibat. Pada penelitian ini memiliki dua variabel yaitu variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan dependen (dipengaruhi) (Sugiyono, 2014). Oleh karena itu penelitian ini digunakan teknis analisis structural equation model. Dengan X1 Program Keluarga Harapan, Y2 Kesejahteraan Masyarakat, X1 Pelayanan Sosial, X2 Bantuan sosial, dan Y3 Permukiman.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi tersebut tidak hanya manusia melainkan benda dan objek serta bagian lainnya yang ada di alam.

Tabel 2. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Di Kelambir lima

No	Kelurahan	KPM
1.	Bandar Utama	227
2	Pasar Gambir	46
3	Tebing Tinggi Lama	39
4	Badak Bejuang	35
5	Mandailing	114

6	Pasar Baru	52
7	Rambung	181
Total		692

Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa populasi merupakan jumlah dari seluruh populasi yang kita gunakan pada penelitian ini terdapat 692 Keluarga Penerima Manfaat PKH di Kecamatan Tebing Tinggi Kota dan yang akan di Kelurahan Bandar Utama Kota Tebing Tinggi yang akan dijadikan populasi (Rusiadi, et al., 2017).

4. HASIL PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini menghasilkan luaran sebagai berikut:

- 1) Hasil inovasi perubahan kebiasaan menjadi pertumbuhan ekonomi masyarakat
- 2) Pagaruh terhadap masyarakat kesehatan dan juga kehidupan dan
- 3) buku panduan pembukuan keuangan.

Berikut produk yang dihasilkan selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Sebuah kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur pada kuesioner tersebut.



Gambar 1. Melakukan Penyuluhan ke masyarakat



Gambar 2. Memberikan Pemahaman Kebiasaan yang dapat merubah ekonomi

Pelatihan bagaimana cara membiasakan perubahan, Pelatihan, pendidikan, pendampingan tentang pentingnya pembukuan laporan keuangan dalam suatu perbelanjaan keluarga, dan serah terima buku panduan keuangan serta buku besar pembukuan keuangan. Memberikan tata cara kebiasaan baru Tim pengabdian juga telah menghasilkan beberapa luaran sebagai bagian dari kontrak dan pemasaran bagi para mitra, yang terbit secara digital pada beberapa media.

5.KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembukuan keuangan dan kualitas pengolahan kebiasaan di suatu keluarga dan keuangan keluarga. Solusi yang ditawarkan di sini, masyarakat mendapatkan pelatihan, pendidikan, pendampingan, sosialisasi, dan penyerahan Teknologi Tepat Guna (TTG) mengenai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Pelatihan Kreatif cara membuat perubahan kebiasaan yang dapat membuat masyarakat berkembang. Pelatihan, pendidikan, pendampingan tentang pentingnya pembukuan laporan keuangan dalam suatu usaha, dan serah terima buku panduan keuangan serta buku besar pembukuan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA.

- Abdillah, Willy and Jogiyanto Partial Least Square(PLS) [Book] 2015. - Yogyakarta : Andi Offset,
- Anggraeni Fitria Nur and P. Eko Prasetyo Kesiapan Penggunaan Uang Elektronik Dalam Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan [Journal]2017. - Semarang : Universitas Negeri Semarang.
- Barany Lestary J [et al.] Bantuan Sosial Ekonomi di Tengah Pandemi COVID-19: Sudahkah Menjangkau Sesuai Sasaran ? [Journal].2020 - Jakarta : CSIS Commentaries ECON-002-ID.
- Carunia Mulya Firdausy garis kemiskinan dan ecopos [Book]2020. - Jakarta : LIPI press, .
- Destiana Henny and Ramadhan Randy Pengaruh Media Sosial Youtube terhadap perkembangan Dkawah Islam dengan Metode Structural Equation Model (SEM) [Journal]. - Jakarta : Sinkron, 2018. - e-ISSN : 2541-2019 p-ISSN : 2541-044X : Vols. 1, 3.
- Dr. Darmin Tuwu S.Sos, M.A. Jurnal Pelayanan Dan Kesejahteraan [Journal]. - Kendari : Laboratorium Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UHO Kendari, 2021. - Vol. Volume 2 Nomor.
- DR. Swiss Tantoro M.Si Pembasmian Kemiskinan [Book]2014. - Yogyakarta-Riau : Pustaka Belajar.
- Elisabeth Nainggolan Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Sumatera Utara Tahun (2010- 2019) [Journal]. - Medan : STIE Eka Prasetya , 2020. - Vols. Vol. 6, No. 2, Hal 89- 99.

Fachrudin and Adi Pengantar Kesejahteraan Sosial [Book]2014. - Bandung : Rafika Aditama

Fariad Annisa Ilmi, Bakhtiar Efendi and Sembiring Rahmat Analisis Kualitas Pelayanan, Pembangunan Akses Modal, dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Pesisirdi Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara [Journal]. 2018-Medan : Universitas Pembangunan Pancabudi - 1 : Vol. 3 .

Restuhadi Fajar, Rosalindai and Hadi Syaiful Analisa Penyebaran Kemiskinan Kabupaten Dan Kota Se- Indonesia [Journal]2021. - Pekanbaru : Universitas Riau. - ISSN-P: 1412-4807 ISSN O: 2503-4375 : Vol. Jurnal Agribisnis Vol: 23 No:1Juni 2021.

Swiss Tantoro M.Si Pembasmian Kemiskinan [Book]2014. - Yogyakarta-Riau : Pustaka Belajar.

Wijaya Sastra Gerakan Literasi Dalam Peningkatan Kemampuan (P2K2) Masyarakat Pra Sejahtera (Keluarag Penerima Manfaat Program Keluarga Di Kecamatan Walanka Kota Serang) [Journal]2019. - Serang : STKIP Pelit